

TESIS

**ANALISIS PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS
WEBSITE DI DESA LAPEO KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



OLEH:

NURHALIMAH

E022211034

**PASCASARJANA PROGRAM ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**ANALISIS PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS
WEBSITE DI DESA LAPEO KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**ANALYSIS OF THE USE OF WEBSITE-BASED VILLAGE
INFORMATION SYSTEM IN LAPEO VILLAGE, POLEWALI MANDAR
DISTRICT**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

**PROGRAM STUDI
ILMU KOMUNIKASI**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**NURHALIMAH
E022211034**

**PASCASARJANA PROGRAM ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**ANALISIS PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DESA
BERBASIS *WEBSITE* DI DESA LAPEO KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**

Disusun dan diajukan oleh

NURHALIMAH

E022211034

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Ilmu Komunikasi Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **25 JULI 2023**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,



Dr. Muhammad Farid, M.Si
Nip. 196107161987021001

Ketua Program Studi
Ilmu Komunikasi,



Dr. Muhammad Farid, M.Si
Nip. 196107161987021001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Alem Febri Sonni, M.Si
Nip. 197402232001121002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si
Nip. 197508182008011008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhalimah
NIM : E022211034
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

ANALISIS PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS WEBSITE DI DESA LAPEO KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan tulisan orang lain. Bahwa tesis yang saya tulis ini, benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Juli 2023

Yang menyatakan


Nurhalimah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan kuasanya sehingga penulis dengan segala usaha dan doa dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Analisis Pemanfaatan Sistem Informasi Desa Berbasis *Website* Di Desa Lapeo Kabupaten Polewali Mandar.”

Tesis ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata II di Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis menyadari proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan, bantuan dan doa restu dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Mandung (Almarhum) dan Hj. Harmia serta saudara dan keluarga besar yang selalu memberika motivasi, harapan yang baik, terutama bantuan dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
2. Dr. H. Muhammad Farid, M.Si selaku ketua program studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin dan pembimbing I dengan sikap yang ramah dan bersahabat dan senantiasa memberikan motivasi bagi teman-teman mahasiswa terkhusus bagi penulis sendiri.
3. Dr. Alem Febri Sonni, M.Si selaku pembimbing II yang telah bermurah hati dan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu, memberikan arahan serta bantuan dalam penyelesaian tesis ini.
4. Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si, Prof. Dr. Tuti Bahfiarti, M.Si dan Dr. Indrayanti, M.Si selaku tim penguji memberikan kemudahan dalam interaksi untuk proses penyelesaian serta masukan-masukan yang diberikan menjadi pelengkap untuk tesis ini.
5. Para dosen Pascasarjana Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dengan segala jerih payah dan memandu perkuliahan sehingga menambah wawasan penulis sesuai bidang studi komunikasi.
6. Jajaran pengelola Pascasarjana Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan maksimal dalam administrasi selama perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir.
7. Sahabat-sahabat M.I.Kom kak Wirda Tri Hasfi, Priskila Primaningrum, Satria Ningsih, Nurul Hijriani, Rajin Wae yang selalu

memberikan motivasi dan dukungan dalam proses penyelesaian tugas akhir.

8. Seluruh mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi angkatan 2021 Universitas Hasanuddin yang bersama penulis menapaki proses pembelajaran dalam ruang perkuliahan.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu yang telah membantu penelitian ini.

Penulis menyadari dalam tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dari segi substansi maupun metodologi. Penulis berharap adanya masukan konstruktif untuk tesis ini agar dapat diperbaiki lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, memberikan nikmat kesehatan, perlindungan, dan segala kebaikan kepada semua pihak yang mengambil peran dalam penyelesaian tesis ini.

Makassar, 15 Juli 2023
Penulis,

Nurhalimah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	!!!
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Konsep	13

1. Pengertian Informasi	13
2. Keterbukaan Informasi Publik.....	18
3. Analisis Pengembangan	22
4. Sistem Informasi Desa.....	28
5. Pengertian <i>Website</i>	33
6. Pengertian Desa.....	43
C. Kajian Teori	48
1. Teori Difusi Inovasi.....	48
2. Teori <i>New Media</i>	54
D. Kerangka Pikir Penelitian	63
BAB III METODE PENELITIAN.....	64
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	64
B. Pengelolaan Peran Sebagai Peneliti.....	65
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	65
D. Penetapan Informan	66
E. Sumber Data.....	67
F. Teknik Pengumpulan Data.....	67
G. Teknik Analisis Data	69
H. Tahap-tahap Penelitian dan Jadwalnya	72

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	74
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	74
1. Profil Desa Lapeo	74
2. Visi dan Misi Desa Lapeo.....	76
3. Gambaran Media Sosial Pemerintah Desa Lapeo Kabupaten Polewali Mandar	77
B. Hasil Penelitian	84
1. Karakteristik Informan	84
2. Pemanfaatan Sistem Informasi Desa Berbasis <i>Website</i> di Desa Lapeo.....	85
3. Faktor Pendukung Pemanfaatan Sistem Informasi Desa Berbasis <i>Website</i> di Desa Lapeo	99
4. Faktor Penghambat Pemanfaatan Sistem Informasi Desa Berbasis <i>Website</i> di Desa Lapeo	113
C. Pembahasan Hasil Penelitian	120
1. Pemanfaatan Sistem Informasi Desa Berbasis <i>Website</i> di Desa Lapeo.....	121
2. Faktor Pendukung Pemanfaatan Sistem Informasi Desa Berbasis <i>Website</i> di Desa Lapeo	128
3. Faktor Penghambat Pemanfaatan Sistem Informasi Desa Berbasis <i>Website</i> di Desa Lapeo	130

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA.....	137

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	73
Tabel 4.1 Identitas Informan	85
Tabel 4.2 Matriks Hasil Wawancara Informan.....	116

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Pilar Kualitas Informasi.....	17
Gambar 2.2. Kategori Penerima Ide Baru	52
Gambar 2.3. Kerangka Pikir Penelitian	63
Gambar 3.1 Model Analisis Data Miles dan Huberman.....	71
Gambar 4.1. Peta Sketsa Desa Lapeo.....	76
Gambar 4.2. Postingan Media Sosial Keterbukaan Informasi Publik	80
Gambar 4.3. Tampilan <i>Instagram</i> Pemerintah Desa Lapeo	81
Gambar 4.4. Tampilan <i>Fanspage Facebook</i> Pemerintah Desa Lapeo...	82
Gambar 4.5. Tampilan <i>Website</i> Pemerintah Desa Lapeo	83
Gambar 4.6. Layanan <i>Website</i> Desa Lapeo	102
Gambar 4.7. Layanan Persuratan Secara <i>Online</i>	103
Gambar 4.8. Permohonan Layanan Desa Lapeo.....	105

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara Admin Desa	142
Lampiran 2 Pedoman Wawancara Informan.....	143
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian	144

ABSTRAK

NURHALIMAH. *Analisis Pemanfaatan Sistem Informasi Desa Berbasis Website di Desa Lapeo Kabupaten Polewali Mandar* (dibimbing oleh Muhammad Farid dan Alem Febrl Sonni).

Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) pemanfaatan sistem informasi desa berbasis *website* di Desa Lapeo Kabupaten Polewali Mandar dan (2) faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan sistem informasi desa berbasis *website* di Desa Lapeo Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis pemanfaatan sistem informasi desa berbasis *website* yang digunakan sebagai wujud transparansi dan keterbukaan informasi publik di Desa Lapeo menggunakan teori Difusi Inovasi Everet M. Rogers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kepentingan pemerintah desa yang sangat membutuhkan forum atau media komunikasi untuk menyebarluaskan informasi tentang pelayanan publik bagi proses pemerintahan desanya serta menghapus *image* pemerintahan yang tidak transparan dan demokratis teratasi dengan adanya *website* desa saat ini sehingga apa yang dikhawatirkan dapat dihilangkan atau setidaknya diminimalisasi. Kepentingan warga masyarakat desa yang membutuhkan informasi terkait dengan mekanisme layanan pemerintah desa dapat langsung mengetahui dengan mengakses melalui *website* desa. Begitu pula dengan kebutuhan informasi lainnya yang diperlukan, mereka dapat langsung mengakses *website* desa dan dapat mengetahui informasi apa yang mereka perlukan tentu sebatas yang telah disediakan oleh pengelola *website* desa. Selain itu, bagi masyarakat desa sangat mudah menyampaikan aspirasi mereka melalui kontak pribadi kepala desa yang telah disediakan oleh pemerintah desa dan (2) faktor yang mendukung pemanfaatan *website* desa seperti penggunaan *website* desa menjadikan pemerintah dan masyarakat tidak terikat oleh jarak dan waktu dan dapat digunakan oleh semua kalangan serta fitur yang disediakan *website* desa sangat interaktif digunakan berinteraksi. Faktor hambatan berasal dari persepsi manfaat *website* desa. Hambatan persepsi kemudahan penggunaan dalam pemanfaatan TIK dan hambatan teknis dalam implementasi *website* desa. Penelitian ini merekomendasikan peneliti lain untuk meneliti cakupan yang lebih luas. Berbagai hal yang perlu direkomendasikan adalah eksistensi pengelolaan *website* desa perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan melengkapi data desa yang belum tersosialisasi serta satuan kerja perlu mendapatkan motivasi maupun dorongan yang lebih besar dari pimpinan.

Kata kunci: sistem informasi desa, keterbukaan informasi publik, *website*



ABSTRACT

NURHALIMAH. *The Analysis of Utilization of Website-Based Village Information Systems at Lapeo Village, Polewali Mandar Regency* (supervised by Muhammad Farid and Alem Febri Sonni).

This study aims at analyzing: (1) the utilization of the website-based village information system, and (2) the supporting and inhibiting factors of the utilization of the website-based village information system at Lapeo Village, Polewali Mandar Regency. This was the descriptive qualitative research. The methods used were observation, interview, and documentation. This research was conducted by analyzing the utilization of the website-based village information system used as the form of the transparency and public information disclosure at Lapeo Village using Everet M Rogers' innovation diffusion theory. The results indicate that: (1) the interests of the village government who really needs the forum or communication media to disseminate information about public services for the village government process erase the image of the government that is not transparent and democratic. Then with the village website, this concern can be eliminated or at least minimized. The interests of villagers who need information related to village government service mechanisms can be directly accessed through the village website, as well as other information needs. They can directly access the village website and find out what information they need, of course, to the extent which has been provided by the village website manager. Moreover, for the villagers, it is very easy to convey their aspirations through the personal contact with the Village Head having been provided by the village government. (2) The factors supporting the utilization of the village website such as the use of the village website make the government and the community not be bound by distance and time and can be used by all groups, and the features provided by the village website are very interactive to interact with the obstacle factors coming from the perceived benefits of the village website, perceived ease of ICT use and technical barriers in the implementation of the village website. This study recommends that other researchers examine a wider scope. Various things needing to be recommended are the existence of village website management needs to be maintained and improved by completing village data that have not been socialized and the work unit needs to get greater motivation and encouragement from the leaders.

Keywords: village information system, public information disclosure, website



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Desentralisasi Pemerintah atau Otonomi Daerah adalah sebuah bentuk Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersistem. Organisasi publik dalam hal ini birokrasi pemerintahan sebagai *stakeholders* seharusnya memiliki rasa kepekaan terhadap kepentingan dan permasalahan masyarakat yang harus dipecahkan. Birokrasi juga dituntut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya dan tidak melaksanakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan melampaui batas kewenangannya demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana salah satu tujuan dari keterbukaan informasi publik adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara disisi lain, pemerintah Indonesia saat ini telah mencanakan pembangunan zona integritas di unit kerja organisasi/instansi pemerintah sebagai langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Hal ini sesuai dengan keputusan LKPP No 130 tahun 2021 tentang penerapan

unit organisasi/instansi sebagai zona integritas. Dengan demikian melalui organisasi/instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menyebarkan informasi publik diharap mampu melayani publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tepat waktu dan sasaran, mudah diakses, terdistribusi secara merata. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Akuntabilitas sendiri merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan-kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan ini akan tercipta bentuk pelayanan publik yang efisien dan efektif, transparan, akuntabel, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat (Wahyudi, 2008).

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi informasi telah membawa kemajuan besar di berbagai bidang kehidupan, diantaranya bidang industri, pendidikan, politik, ekonomi, pemerintahan dan lain sebagainya. Pemanfaatan teknologi informasi pada bidang pemerintahan diantaranya adalah penggunaan sistem informasi dalam mengolah informasi tentang profil desa dan potensi sumber daya desa dalam bentuk pengembangan sistem informasi desa.

Sistem informasi desa merupakan sistem yang mempunyai peran sangat penting dalam upaya mempublikasikan pemerintahan desa terutama berkaitan dengan informasi tentang potensi sumber daya desa, pembangunan desa, fasilitas dan layanan umum yang dimiliki sebagai

pemenuhan hak dari setiap warga negara terutama penduduk di Kabupaten Polewali Mandar itu sendiri.

Sejalan dengan arah demokrasi terbuka yang ditandai semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, terlebih lagi kondisi ini didukung adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, maka tuntutan terhadap tersedianya media informasi sebagai sarana publikasi desa kepada semua lapisan masyarakat menjadi sangat strategis untuk dikembangkan sebagai bagian dari saluran komunikasi dan informasi dua arah baik dari pemerintah desa ke warganya ataupun sebaliknya dari warga ke pemerintahnya. Namun demikian, sistem informasi desa yang ada di beberapa desa di Kabupaten Polewali Mandar saat ini masih menggunakan sistem manual, sehingga banyak permasalahan khususnya dalam hal akses informasi tentang desa diantaranya informasi tentang potensi sumber daya desa belum terpublikasi, informasi data aset tidak dapat diketahui (Risun, dkk: 2019: 45).

Hadirnya teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah dalam pengarahannya sumber daya, berbagi informasi dan mengarahkan aktivitas masyarakat. Saat ini pemanfaatan teknologi informasi komunikasi berkembang pesat dan semakin meluas seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan ketersediaan informasi yang cepat dan akurat. Kemajuan teknologi informasi komunikasi saat ini adalah pemanfaatan jaringan internet yang memungkinkan bagi setiap orang

dapat mengakses atau memperoleh data-data yang tersedia secara bersama-sama melalui yang saling terhubung. Dengan kemudahan dalam penggunaannya, penerapan teknologi berbasis sistem informasi ini menjadi salah satu pilihan alternatif untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat proses birokrasi pemerintahan yang semakin dinamis.

Informasi tentang desa adalah hal yang penting yang telah diatur dalam peraturan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik. Bagi masyarakat, informasi mengenai desa biasanya didapatkan pada saat ada kegiatan di desa. Walaupun telah mengikuti kegiatan tersebut masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara detail mengenai desanya sendiri.

Harapan dari sistem informasi ini ditujukan untuk membantu pemerintah desa dalam mendokumentasikan data-data milik desa, berguna dalam pencarian data dan mempercepat pelayanan kepada penduduk. Penyebaran informasi dan potensi yang dimiliki oleh suatu desa dengan menggunakan teknologi yang sudah berkembang meningkatkan ketepatan dan kualitas yang tersedia. Era teknologi dan globalisasi ini juga semakin mendorong timbulnya kebutuhan informasi yang cepat dan tepat. Hal itu saat ini sangat dirasakan bagi masyarakat di berbagai bidang.

Sistem informasi ini dikembangkan dengan menggunakan aplikasi berbasis *website* serta menggunakan konten manajemen sistem yang bersifat *open source* dengan *database* berbasis *MySQL*, tujuannya adalah agar pengembangan berikutnya dapat dilakukan oleh orang lain.

Website desa menjadi “rumah” bagi desa di dunia internet. Sebagai rumah, beragam konten bisa ditampilkan di *website* desa, mulai dari tulisan, foto, dokumen publik, hingga video. Konten yang dipublikasikan di *website* desa menjadi catatan sejarah desa sekaligus “*etalase*” yang dapat dilihat oleh siapapun dari belahan dunia manapun. Tak sedikit desa yang sudah membuktikan dampak dari menuliskan potensi dan kegiatan di desa, baik berupa tanggapan, apresiasi maupun transaksi. Bahkan *website* desa menjadi media warga di perantauan untuk dapat mengetahui perkembangan terkini di desanya. Selain sebagai media informasi, pemanfaatan *website* desa mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahannya dengan lebih baik, cepat, efektif dan transparan.

Website desa merupakan salah satu media yang memiliki daya jelajah sangat luas, bahkan mendunia. Saat desa memiliki *website*, desa bisa menyebarluaskan informasi di desanya seperti berita desa, produk unggulan, kondisi desa, maupun laporan desa yang dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun.

Untuk menegaskan identitas desa di dunia internet. Desa sebaiknya menggunakan nama domain desa. Domain *desa.id* merupakan kode domain resmi yang bisa digunakan oleh desa, yaitu kesatuan masyarakat

hukum yang berhak mengelola rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul maupun hak tradisionalnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan fasilitas untuk desa dapat membangun *websitenya* melalui *backend* (halaman admin) pada *website.desa.id*.

Keberadaan *website* desa (*desa.id*) telah memberi warna baru dunia internet di Indonesia. Pada November 2017, jumlah desa yang sudah terhubung dengan program Telekomunikasi dan Informatika (TIK) baru 60 persen dari total 75 ribu desa yang dibina Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, angka ini cukup fantastis karena sebagian besar desa mampu mengelola *website* justru berasal dari daerah yang tidak memiliki akses internet yang bagus (Cahyani, 2017).

Menurut Sepriana (2017), adapun kendala yang saat ini masih dihadapi dalam pemerataan TIK ke semua desa adalah jaringan telekomunikasi yang belum merata di setiap daerah. Untuk sekedar menggunakan konten, mereka susah payah mencari titik akses di kota terdekat. Dahsyatnya, desa-desa itu justru meningkatkan pertumbuhan ekonomi warganya berkat promosi dan pemasaran produk unggulan desa secara *online*.

Peran Kominfo dalam mendorong seluruh desa di Indonesia terhubung untuk berpartisipasi dalam *Information and Communication Technology (ICT)* adalah dengan menyediakan *domain id* dan *hosting* laman *website* desa secara gratis selama satu tahun (Sepriana, 2017).

Hal ini akan memudahkan perangkat desa untuk memberikan informasi tentang situasi di desa yang dapat diakses oleh banyak pemangku kepentingan.

Hal itu menunjukkan keberadaan *website* desa memiliki hubungan yang erat dengan tata kelola dunia perdesaan. Keberadaan *website* desa tak sekedar sebagai media untuk menyebarkan informasi (info mobilisasi) dari desa tapi juga untuk mendorong tumbuhnya para pelaku ekonomi pemasaran produk unggulan di dunia perdesaan (mobilitas sumber daya). Bila *tren* di sejumlah desa itu mampu direplikasi oleh desa-desa lainnya, maka bukan hal yang mustahil bila 5-10 tahun kedepan, desa mampu menjadi garda terdepan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kondisi terkini dari penerapan sistem pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah desa Lapeo masih belum mengoptimalkan TIK. Berdasarkan hal tersebut dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bagian ketiga mengenai Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pasal 86 ayat (1), (2) dan (3) mendorong agar pemerintahan desa dapat berperan dalam memberikan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat desa dan pemangku kepentingan serta pelayanan dasar yang termasuk dalam sebuah sistem informasi desa.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa pemerintah Desa Lapeo masih merasa belum mampu untuk mengembangkan sistem informasi desanya. Selain itu, desa masih belum maksimal dalam

mengidentifikasi potensi desa, sehingga data desa masih sangat tidak terukur. Berdasarkan tuturan kepala Desa Lapeo, bahwa desa masih membutuhkan orang-orang yang kompeten di bidang pengembangan sistem informasi. Oleh karena itu, terbatasnya SDM (Sumber Daya Manusia) desa juga memicu lahirnya berbagai macam masalah yang harus segera diberikan alternatif penyelesaian.

Selain mendorong pemerataan akses internet dan optimalisasi pelayanan publik, literasi digital juga sangat penting di era transformasi digital tujuannya untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya internet dan teknologi serta memanfaatkannya secara tepat untuk kehidupan sehari-hari.

Pentingnya hal ini diangkat menjadi sebuah penelitian sebab di Kabupaten Polewali Mandar telah tersedia *website* desa seperti kenje.website.desa.id, bumimulyo.website.desa.id, mirring.website.desa.id, lapeo.website.desa.id, dan lain-lain. Akan tetapi pengimplementasiannya membutuhkan proses dimana salah satunya adalah pemberian pengetahuan dan pemahaman akan aksesibilitas dan tata kelolanya.

Menyikapi kondisi di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian di Desa Lapeo Kabupaten Polewali Mandar lalu kemudian mencoba untuk menganalisis pemanfaatan sistem informasi berbasis *online* yang seyogyanya dapat dikembangkan pada seluruh desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan sistem informasi desa berbasis *website* di Desa Lapeo Kabupaten Polewali Mandar?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan sistem informasi desa berbasis *website* di Desa Lapeo Kabupaten Polewali Mandar?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis pemanfaatan sistem informasi desa berbasis *website* di Desa Lapeo Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan sistem informasi desa berbasis *website* di Desa Lapeo Kabupaten Polewali Mandar.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan referensi dan menambah khazanah ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Aparat Desa

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan sistem informasi desa.

b. Masyarakat

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk megembangkan potensi yang ada di desa.

c. Peneliti

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menganalisis sistem informasi desa (penelitian sejenis) pada pengembangan ilmu ke depannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

1. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan jenis penelitian ini dilakukan oleh Herpendi (2017) dengan judul “Sistem Informasi Desa di Kecamatan Takisung”.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan dengan adanya sistem informasi desa di Kecamatan Takisung masyarakat bisa secara langsung mengakses berbagai macam informasi yang disajikan. Begitu pula dengan para pimpinan desa bisa secara langsung memberikan maupun memperbarui informasi terkait desa yang mereka bina. Segala bentuk informasi mengenai kepengurusan kependudukan bisa diakses di laman sistem informasi desa. Dokumen-dokumen dan formulir yang berkaitan dengan kependudukan juga bisa diunduh di laman sistem informasi desa.

2. Penelitian yang sejenis juga pernah dilakukan oleh Randi Adam (2019) dengan judul “Sistem Informasi Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara Berbasis *Web*”.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa fungsi-fungsi pada Sistem Informasi Desa Negara Tulang Bawang telah berjalan dengan baik sesuai *requirement*. Kesimpulannya adalah sistem ini layak

digunakan untuk membantu kerja staf desa dalam pengelolaan data kependudukan.

3. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Risun, Moch. Arief Sutisna dan Dora Bernadisman (2019) dengan judul “Sistem Informasi Desa Berbasis *Web* Pada Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes”.

Hasil dari penelitian ini adalah terpublikasinya informasi tentang kemajuan, potensi dan layanan desa yang dapat diakses tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Metode yang digunakan adalah metode *Waterfall* dan bahasa pemodelan *Unified Modeling Language* (UML). Teknik pengumpulan data melakukan observasi ke lapangan. Kelebihan dari penelitian ini terdiri dari menu profil desa, aset desa, potensi desa yang cukup lengkap. Kelemahannya adalah pada bagian aset tempat ibadah dan aset pendidikan belum ada menampilkan langsung lokasi aset tersebut yang terhubung ke *google maps*.

Hasil-hasil penelitian yang disajikan dalam penelitian tersebut adalah penelitian yang terkait dengan pengadaan sistem informasi desa. Sehingga beberapa konsep dan temuan dalam penelitian tersebut dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini dengan menitikberatkan pada analisis pemanfaatannya. Selain itu beberapa penelitian yang ada, peneliti belum menemukan penelitian tentang analisis pemanfaatan sistem informasi desa berbasis *website* di Desa Lapeo yang menjadi penting guna masukan dan perbaikan untuk pengembangan selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan arah kebijakan pada tingkat desa terutama Desa Lapeo itu sendiri. Menjadi pedoman umum dalam rangka penyusunan langkah-langkah strategis pemerintah Desa Lapeo dalam mewujudkan *smart village* dan keterbukaan informasi publik. Secara khusus, meningkatkan tingkat pemahaman dan kesadaran pemerintah desa maupun masyarakat pengguna sistem informasi desa berbasis *website* dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 86.

B. KAJIAN KONSEP

1. Pengertian Informasi

Istilah informasi sering kita soroti dalam lingkup teknologi, seperti istilah teknologi informasi yang umum kita ketahui. Namun informasi memiliki pengertian yang sangat luas bukan hanya ada dalam teknologi. Meski kenyataannya tidak bisa kita pungkiri bahwa informasi ini memiliki kaitan erat dengan teknologi, karena dengan perkembangan teknologi itu sendiri informasi juga berkembang dengan pesat karena itu tepatlah bahwa perkembangan teknologi dan informasi ini membentuk sebuah era yaitu "Era Informasi".

Informasi sudah menjadi kebutuhan manusia yang *essensial* (sangat penting) untuk mencapai tujuan. Melalui informasi manusia dapat mengetahui peristiwa yang terjadi disekitarnya serta memperluas pengetahuan. Menurut Shannon dan Weaver (dalam Vardiansyah, 2004),

informasi adalah energi yang terpolakan, yang mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan dari kemungkinan pilihan-pilihan yang ada, informasi adalah hasil dari proses intelektual seseorang.

Informasi merupakan data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan dalam pembuatan keputusan. Penyedia informasi pada pusat-pusat informasi seharusnya dapat memahami dan mengetahui apa sesungguhnya yang dicari oleh pengguna dan pencari informasi.

Menurut Anggraeni dan Irviani (2017:13) informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Sedangkan menurut Sutabri dalam Trimahardhika dan Sutinah (2017:250) informasi merupakan suatu data yang telah diolah, diklasifikasikan dan diinterpretasikan serta digunakan untuk proses pengambilan keputusan.

Informasi merupakan hal yang sangat mendasar yang sangat diperlukan oleh suatu kegiatan dalam pengambilan suatu keputusan agar tidak terjadi kesalahan. Informasi juga dapat diartikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerima informasi.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang telah disusun sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat karena dapat dikomunikasikan kepada seseorang yang menggunakannya untuk membuat keputusan. Informasi terdiri dari data

yang diambil kembali, diolah atau digunakan untuk memberi dukungan keterangan bagi pengambil kesimpulan, argumentasi atau sebagai dasar untuk peramalan atau pengambilan keputusan. Pemakaian informasi jauh lebih penting karena informasilah yang akan dipakai untuk menunjang keputusan manajemen.

Pengelompokkan Informasi, informasi dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Informasi Strategis. Informasi ini digunakan untuk mengambil keputusan jangka panjang, yang mencakup informasi eksternal, rencana perluasan perencanaan, dan sebagainya.
- 2) Informasi Taktis. Informasi ini dibutuhkan untuk mengambil keputusan jangka menengah, seperti informasi tren penjualan yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun rencana penjualan.
- 3) Informasi Teknis. Informasi ini dibutuhkan untuk keperluan operasional sehari-hari, seperti informasi persediaan stock, retur penjualan, dan laporan kas harian.

Karakteristik Informasi, informasi dapat bermanfaat bagi organisasi/instansi sekiranya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Relevan, informasi harus memiliki makna yang tinggi sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi yang menggunakannya dan dapat digunakan secara tepat untuk membuat keputusan.

- 2) Andal, suatu informasi harus memiliki keterandalan yang tinggi, informasi yang dijadikan alat pengambilan keputusan merupakan kejadian nyata dalam aktifitas perusahaan.
- 3) Lengkap, informasi tersebut harus memiliki penjelasan yang rinci dan jelas dari setiap aspek peristiwa yang diukurnya.
- 4) Tepat Waktu, setiap informasi harus dalam kondisi yang update tidak dalam bentuk yang usang, sehingga penting untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan.
- 5) Dapat Dipahami, informasi yang disajikan dalam bentuk yang jelas akan memudahkan orang dalam menginterpretasikannya.

Menurut Jogiyanto (2005:10) mengemukakan bahwa informasi dikatakan berkualitas jika memenuhi 3 aspek yaitu diantaranya akurat (*accurate*), tepat waktu (*timelines*), dan relevan (*relevance*).

John Burch dan Grudnitski (1986) kualitas informasi (*quality of information*) digambarkan dengan berbentuk sebuah pilar dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2.1. Pilar Kualitas Informasi.

(Sumber: Buku Ajar Konsep Sistem Informasi)

1) Akurat (*accurate*)

Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti bahwa informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi mungkin banyak mengalami gangguan (*noise*) yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut.

2) Tepat waktu (*timelines*)

Informasi yang sampai kepada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi, karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Bila pengambilan keputusan terlambat maka dapat berakibat fatal bagi organisasi.

3) Relevan (*relevance*)

Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk setiap orang berbeda. Menyampaikan informasi tentang penyebab kerusakan mesin produksi kepada akuntan perusahaan tentunya kurang relevan. Akan lebih relevan bila ditujukan kepada ahli teknik perusahaan.

2. Keterbukaan Informasi Publik

Hak warga negara untuk memperoleh informasi publik dijamin oleh UUD, yaitu tercantum pada pasal 28F yang berbunyi: setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Berdasarkan UU 14 Tahun 2008 bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Petunjuk pelaksanaan UU KIP dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Salah satu sumber atau penyedia informasi publik tersebut adalah badan atau sektor publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri

Pengertian informasi, informasi publik, dan badan publik yang tercantum pada pasal 1 dan Bab I dari UU KIP tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
- b. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- c. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumbangam masyarakat, dan/atau negeri.

Kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi publik diatur dalam Pasal 7 yaitu sebagai berikut:

- a. Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. Badan publik wajib menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- c. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

UU KIP, bagian keempat pasal 9 hingga Pasal 11 terdapat ketentuan mengenai informasi apa yang disampaikan oleh setiap badan publik di Indonesia adalah:

- a. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala/reguler (pasal 9):
 - 1) Informasi yang berkaitan dengan badan publik;
 - 2) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait;
 - 3) Informasi mengenai laporan keuangan, dan/atau;
 - 4) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (pasal 10)
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat (pasal 11)

Informasi publik adalah yang bersifat serta merta dan setiap saat, Pasal 10 menyatakan bahwa badan publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hidup hajat orang banyak dan ketertiban umum. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik tersebut disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

Jenis informasi yang wajib tersedia setiap saat diatur dalam pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi:

- a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;

- c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;
- e. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

3. Analisis Pengembangan

a. Pengembangan Sistem Informasi

Menurut Lilis Puspitawati (2010), analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah, kesempatan dan hambatan yang terjadi serta kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. Tahap analisis dilakukan setelah tahap perencanaan dan tahap desain sistem telah dilaksanakan. Tahap analisis pengembangan sistem merupakan faktor yang menentukan dalam berhasil atau tidaknya pengembangan suatu sistem informasi.

Pengembangan sistem informasi berbasis komputer merupakan suatu tugas yang kompleks dan rumit yang membutuhkan banyak sumber daya yang membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikannya. Proses pengembangan sistem harus melalui beberapa tahapan yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan rencana tersebut diimplementasikan. Pengembangan sistem dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan dari para analis sistem, perancang, dan pemakai sistem yang mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi (Lilis Puspitawati, 2010).

Beberapa metode analisis sistem yang biasa digunakan pengembang sistem informasi dalam menganalisis sistem informasi yang sedang dibangunnya adalah sebagai berikut:

1. Analisis Problem sistem
2. Analisis Kelemahan Sistem
3. Analisis *Performa, Information, Economic, Control and Efficiency* (PIECES)
4. Analisis Studi Kelayakan
5. Analisis Kebutuhan Sistem

Tahapan utama siklus hidup pengembangan sistem terdiri dari tahap perencanaan, tahap desain sistem, tahap seleksi sistem, tahap implementasi sistem, dan tahap perawatan sistem.

Menurut (Kustandi & Darmawan, 2020: 7), perkembangan media secara umum terdiri atas tiga generasi utama, yaitu: (1) Media pada

generasi ini meliputi surat kabar/majalah; (2) radio, film, dan televisi; dan (3) telematika, komputer.

Ciri-ciri Media Generasi I adalah sebagai berikut:

1. Arus informasi satu arah
2. Informasi tercetak
3. Informasi langsung dapat dibaca
4. Informasi di atas kertas, papan, dan lain-lain
5. Daya rangsang rendah
6. Biaya operasional murah
7. Cara kerja mekanis-elektris.

Ciri-ciri Media Generasi II adalah sebagai berikut:

1. Arus informasi satu arah
2. Informasi dalam bentuk audio, audiovisual, pita kaset
3. Informasi dapat dibaca dan didengar ketika disiarkan serta diputar ulang
4. Informasi di radio, layar televisi, monitor
5. Daya rangsang tinggi
6. Biaya operasional mahal
7. Cara kerja elektrik

Ciri-ciri Media Generasi III adalah sebagai berikut:

1. Arus informasi dua arah
2. Informasi audio, audiovisual, vit kaset atau disket

3. Informasi dapat didengar dan dilihat ketika disiarkan atau diputar ulang
4. Informasi pada tayangan TV, layar monitor/komputer
5. Daya rangsang tinggi
6. Biaya operasional mahal
7. Cara kerja elektrik

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Menurut Faqihudin (2010), kemajuan suatu bangsa dalam *Human Development Index* (HDI) meliputi kesehatan dan kependudukan, pendidikan serta ekonomi. Salah satu aspek yang penting pada perkembangan sumber daya manusia adalah pendidikan. Pendidikan merupakan proses yang didalamnya terdapat berbagai kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya.

Samsudin (2010) mengemukakan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah penyiapan manusia atau pegawai untuk memikul tanggung jawab lebih tinggi dalam organisasi atau perusahaan. Pengembangan atau pembangunan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kemampuan intelektual yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Pembangunan sumber daya manusia berpijak pada fakta bahwa setiap tenaga kerja membutuhkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang lebih baik. Pembangunan lebih terfokus pada kebutuhan jangka panjang dan hasilnya hanya dapat diukur dalam waktu jangka panjang. Juga membantu para pegawai untuk

mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan pekerjaan atau jabatan yang diakibatkan oleh adanya teknologi baru atau pasar produk baru, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi untuk lebih melek teknologi informasi.

Menurut (Samsudin & Salidi, 2006) peningkatan efisiensi dan produktivitas sumber daya manusia dapat dicapai dengan cara meningkatkan:

1. Pengetahuan pegawai
2. Keterampilan pegawai
3. Sikap dan tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya.

McLagan dan Suhadolnik (Wilson, 1999:10) mengemukakan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah pemanfaatan pelatihan dan pengembangan, pengembangan karir, dan pengembangan organisasi yang terintegrasi antara satu dengan yang lain, untuk meningkatkan efektivitas individu dan organisasi.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dalam memfasilitasi pegawai agar memiliki pengetahuan, keahlian, dan/atau sikap yang akan datang. Aktivitas yang

dimaksud tidak hanya pada aspek pendidikan dan pelatihan saja, akan tetapi menyangkut aspek karir dan pengembangan organisasi.

Menurut (Simamora, 2006: 276) tujuan diselenggarakan pengembangan pegawai/aparatur adalah diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan.

Menurut (Martoyo, 1992) tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah dapat ditingkatkannya kemampuan, keterampilan dan sikap pegawai/anggota organisasi sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran-sasaran program ataupun tujuan organisasi.

Selanjutnya menurut (Siagian, 1997: 183) mengemukakan bahwa ada tujuh manfaat dari adanya pengembangan sumber daya manusia yaitu:

- a. Peningkatan produktivitas kerja
- b. Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan
- c. Tersedianya proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat
- d. Meningkatnya semangat kerja seluruh anggota dalam organisasi
- e. Mendorong sikap keterbukaan manajemen
- f. Memperlancar jalannya komunikasi yang efektif
- g. Penyelesaian konflik secara fungsional.

4. Sistem Informasi Desa

Sistem informasi merupakan suatu komponen yang terdiri dari manusia, teknologi informasi dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, menganalisis dan menyebarkan informasi untuk mencapai suatu tujuan (Tonggiroh & Hakim, 2017).

Sistem informasi menurut (Krismiaji, 2015: 15) adalah cara-cara yang terorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, dan mengolah serta menyimpan data, dan cara-cara diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sistem informasi merupakan suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi organisasi yang bersifat manajerial dalam kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang akan diperlukan.

Sistem informasi secara teknis sebagai satuan komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan atau mendapatkan kembali, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali. Informasi berarti data yang lebih dibentuk ke dalam suatu format yang mempunyai arti dan berguna bagi manusia. Sebaliknya data merupakan sekumpulan baris fakta yang mewakili peristiwa yang terjadi pada organisasi atau pada lingkungan fisik sebelum diolah ke dalam suatu format yang dapat

dipahami dan digunakan orang. *Input* mengumpulkan data mentah dari dalam organisasi atau dari lingkungan eksternal. *Output* mengalihkan informasi yang diproses kepada orang-orang yang akan menggunakannya atau kepada aktivitas yang membutuhkannya.

Berdasarkan Anggraeni (2017), sistem informasi adalah suatu kombinasi dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran pada informasi dalam suatu organisasi dari beberapa komponen yang terkait di dalamnya. Sedangkan menurut Hutahaean (2015), yang dimaksud sistem informasi adalah pertemuan kebutuhan pengelolaan dari suatu organisasi serta penyediaan pihak luar tertentu dengan laporan yang dibutuhkan dari sistem tersebut. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa sistem informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam sebuah organisasi yang dikombinasi dalam penyediaan informasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan.

Sistem Informasi Desa (SID) yang awalnya disebut SIDESA hingga akhirnya berubah menjadi SID, memiliki dua pengertian, dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit SID dimaksudkan sebagai sebuah aplikasi yang membantu pemerintah desa dalam mendokumentasikan data-data milik desa, guna memudahkan proses pencariannya. Sedangkan dalam arti luas, SID diartikan sebagai suatu rangkaian/sistem baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di komunitas (Wilhem Wau, 2012: 7).

Bagian Ketiga UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan menyebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

Sistem informasi desa merupakan bagian dari pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Sistem informasi desa ini diterapkan karena adanya aturan secara khusus dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 86. Undang-Undang Desa ini ingin menegaskan pentingnya SID dalam perencanaan dan pembangunan desa, karena itu dalam Pasal 86 ayat (2) dan ayat (5) mewajibkan kepada Pemerintah dan Pemda untuk mengembangkan SID, dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa agar dapat diakses oleh masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya. Ayat (6) menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk desa. Informasi yang disajikan sistem informasi desa sesuai amanat Pasal 86 ayat 4, harus meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Sistem informasi desa melalui kecanggihan teknologi ini, diaplikasikan pada media internet melalui domain desa.id.

Gagasan domain ini berawal dari ketidakjelasan domain apa yang tepat digunakan oleh Desa yang telah memiliki situs *web*. Khususnya Desa-desa yang tergabung dalam Gerakan Desa Membangun (GDM). Gerakan Desa Membangun merupakan gerakan untuk media belajar desa-desa dalam memanfaatkan (salah satunya) teknologi informasi, lebih khusus *website*. Domain *desa.id* merupakan identitas untuk *website* resmi desa, karena teregister langsung dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam pengelolaannya. Namun, sejalan dengan perkembangannya sistem informasi desa tidak selalu menggunakan *desa.id*, masih banyak pula desa yang menggunakan *blogspot.co.id* sebagai media informasi di internet. Sebenarnya, apapun bentuk dari domain sebagai identitas media informasi tersebut tidak menjadi permasalahan, selama sistem informasi desa berjalan dan dikelola dengan baik, agar keterbukaan informasi ditingkat desa terwujud.

Dengan adanya Teknologi Informasi dan Komunikasi, memudahkan manusia dalam berinteraksi, saling memberikan dan menyampaikan informasi satu dengan yang lain, tanpa terhambat oleh jarak, ruang dan waktu. Maka dari itu perlu adanya UU yang mengatur di bidang informasi, komunikasi dan media massa yang akan menjamin hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang diperlukan. Untuk memfasilitasi hal tersebut, maka pemerintah menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan mengeluarkan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UU No. 14/2008. UU ini memberikan kewajiban kepada setiap badan

publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa hal tertentu.

Tujuan dari adanya UU ini adalah untuk:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan, kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik, yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik, untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Maka dari itu Sistem Informasi Desa penting dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan termasuk memberikan layanan informasi

pemerintah desa. Dengan adanya layanan informasi pemerintah desa dalam pemanfaatan SID adalah salah satu upaya pemerintah desa untuk mewujudkan transparansi informasi ke berbagai pihak. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut serta untuk mengetahui serta mengawasi kebijakan pemerintah desa, serta ikut berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pemerintah desa. SID akan memberikan akses publik akan informasi sesuai dengan UU KIP, yakni UU Nomor 14/2008.

5. Pengertian *Website*

Menurut Yuhefizar (2013), *website* adalah informasi yang terkandung dalam sebuah domain yang terdapat pada keseluruhan halaman-halaman *website*. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa website merupakan suatu sistem dan informasi yang disajikan dalam sebuah domain yang berbentuk *hypertext* dalam menghubungkan dengan dokumen dalam teks, gambar, multimedia, dan lainnya yang ditampilkan pada jaringan internet.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, perkembangan media menjadi salah satu kemajuan yang tidak dapat dielakkan sehingga informasi dengan mudah diakses hanya dengan sekali tekan. Keberadaan internet sebagai media baru dianggap sebagai gagasan yang revolusioner dimana internet dapat menyebarkan informasi lebih luas dan tidak terikat oleh waktu dan lebih mudah untuk diakses.

Media *online* adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis pada telekomunikasi dan multimedia dengan memiliki informasi yang bersifat *update* (terbaru), aktual dan menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet. Media *online* merupakan media yang berbasiskan teknologi komunikasi interaktif dalam hal ini jaringan komputer dan oleh karenanya ia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki media konvensional lainnya, salah satunya adalah pemanfaatan internet sebagai wahana dimana media tersebut ditampilkan, sekaligus sarana produksi dan penyebaran informasinya.

Website Desa Lapeo (lapeo.website.desa.id) telah dibuat namun pemanfaatannya belum optimal, sehingga diperlukan pelatihan dan pendampingan bagi para admin agar lebih mahir dalam menggunakan *website*. Pemanfaatan *website* pada Desa diharapkan juga dapat menjadi sebagai media promosi hasil perkebunan, pertanian dan olahan makanan, seperti abon dan produk UMKM lainnya. Para kelompok usaha dapat mendaftarkan barang yang akan dijual pada admin *website* atau aparat desa, sehingga peluang untuk penjualan barang lebih luas. Melalui *website* ini, informasi yang dimuat diantaranya profil desa, kegiatan-kegiatan rutin desa, serta promosi hasil pertanian dan kelompok usaha. Hasil pertanian yang dapat dipromosikan misalnya, jagung, cabai, padi sedangkan produk olahan misalnya abon dan pupuk dari ikan hasil laut.

Dalam rangka memotivasi masyarakat, khususnya aparat desa dapat memanfaatkan *website* desa sebagai media penyebaran informasi

diperlukan kegiatan berupa pelatihan dan pendampingan. Kegiatan ini akan dilakukan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari pengumpulan profil Desa yang akan dimuat pada *website* desa, pelatihan pembuatan berita dan pengunggahan gambar atau dokumentasi kegiatan pada *website* desa. Pemanfaatan *website* desa sebagai media promosi hasil pertanian, perkebunan dan hasil olahan makanan.

Media promosi dalam bentuk *website* adalah media yang lebih murah dibandingkan dengan media promosi lainnya misalnya media cetak dan media massa. Situs *web* memiliki fungsi yang lebih luas tetapi diperlukan pengoptimalan pemanfaatan *web* dengan cara memperhatikan isi atau konten dari *web*, artikel yang diunggah dapat menarik minat pembaca dan memberikan kesan yang baik. Maka dari itu diperlukan pengelolaan *web* yang optimal agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi desa Lapeo. Dengan memanfaatkan *platform WordPress* yang dapat diaplikasikan dengan mudah. *WordPress* adalah sebuah aplikasi *open source Content Management System (CMS)* yang dapat digunakan secara gratis dan bebas dimodifikasi sesuai dengan keinginan pengguna, dengan menyediakan *plugin* yang memudahkan pengguna untuk menambahkan fitur pada *website*. Beberapa manfaat dari penggunaan *WordPress* di antaranya CMS paling banyak dipakai, fleksibel dan mudah digunakan, memiliki link management integrasi serta dilengkapi dengan fasilitas keamanan yaitu anti spam.

Pada dasarnya media *online* mengusung dua prinsip utama pengelolaan pengetahuan (*Knowledge Management*). Pertama adalah menyimpan pengetahuan secara digital yang dapat diunggah secara *online* karena disimpan dalam jaringan internet maka setiap informasi dapat dipelihara, dikategorikan, dianalisa, diperbaharui dan disebarluaskan dengan lebih efisien. Prinsip kedua yang diangkat oleh media *online* adalah memudahkan akses terhadap pengetahuan karena dapat diunduh secara *online* maka siapa saja baik individu maupun organisasi dapat mengakses informasi juga dapat menyebarkan. Karenanya pertukaran sebuah informasi dapat menjadi lebih efektif, tidak dipungkiri kehadiran berbagai *social network* seperti *facebook*, *instagram*, *website* juga meningkatkan kebutuhan pengguna untuk mengakses media *online* guna menambah pengetahuan.

Menurut Romli (2012) karakteristik umum yang dimiliki media *online*, yaitu:

a. Cepat (*Immediacy*)

Peristiwa atau kejadian yang terjadi dilapangan dapat diunggah (*upload*) secara langsung kedalam situs *website* dalam hitungan detik. Dengan demikian mempercepat distribusi informasi ke pasar (pengakses), dengan jangkauan *global* via jaringan internet dan dalam waktu beriringan.

b. Pembaruan (*Update*)

Updating informasi dapat dikerjakan dengan mudah serta cepat, baik berupa perbaikan isi, data, tata bahasa ataupun berupa perkembangan terbaru sebuah isu atau momen. Ketika ada *update* informasi terkait informasi lama, maka bisa dilakukan perubahan. Penyajian informasi yang bersifat *real time* ini menyebabkan tidak adanya waktu yang diistimewakan (*prime time*) dan tidak ada istilah tenggat waktu (*deadline*) karena penyediaan informasi berlangsung tanpa putus hanya tergantung kapan pengguna akan mengaksesnya.

c. Interaktivitas (*Interactivity*)

Salah satu kelebihan media *online* adanya fungsi interaktif. Berbeda dengan media konvensional yang bersifat searah (*linear*) dengan kecenderungannya yang sepihak dari atas (*top-down*), sedangkan media *online* bersifat dua arah (*egaliter*) dengan berbagai fitur media *online* seperti *email*, *chat* dan *survey*. Pengakses bahkan bisa memberitahu keluhan, anjuran dan tanggapan ke bagian redaksi dan segera bisa dibalas.

d. Personalisasi (*Audience Control*)

Pembaca atau pengguna semakin otonom dalam menentukan informasi mana yang ia butuhkan. Media *online* memberikan peluang kepada setiap pembaca hanya mengambil informasi yang relevan bagi dirinya dan menghapus informasi yang tidak ia butuhkan. Jadi selektivitas informasi dan sensor berada ditangan pengguna (*self control*).

e. Kapasitas tidak terbatas (*Storage and Retrieval*)

Media *online* tidak dibatasi halaman atau waktu (durasi) seperti pada media konvensional. Media *online* dapat mempublikasikan berita sebanyak-banyaknya dan sepanjang-panjangnya. Berita yang tersaji juga tersimpan atau terdokumentasikan dengan baik yang dapat diakses kapan saja melalui kotak pencarian (*search box*), kategori, ataupun label/tag. Bahkan informasi yang sudah di *publish* pun masih bisa diakses atau tersimpan jika berita itu di *posting* ulang (*repost*) atau di *screenshot* oleh pengguna.

f. Terhubung dengan sumber lain (*Hyperlink*)

Setiap data atau informasi yang disajikan dapat dihubungkan dengan sumber lain yang juga berkaitan dengan informasi tersebut, atau disambungkan ke bank data yang dimiliki media tersebut atau dari sumber-sumber luar.

g. Kapabilitas multimedia

Media *online* dapat menyajikan informasi berupa teks, suara, gambar/foto, dan video sekaligus. Karakteristik ini menjadi keunggulan media *online* dibandingkan media konvensional.

Memiliki kebutuhan yang semakin tinggi akan informasi yang dapat diakses segera atau *real time* maka perkembangan media atau portal *online* juga situs pertukaran pengetahuan *online* akan semakin berkibar di masa depan. Ketersediaan akses internet di seluruh wilayah Indonesia tentu saja menjadi suatu keutamaan agar bangsa ini tidak ketinggalan

akan pembangunan teknologi yang melesat semakin cepat. Disisi lain, kita juga perlu mengikuti perkembangan teknologi ini dan menyesuaikan diri dengan kemajuannya. Bukan hanya dari sisi perangkat dan teknologinya saja, namun juga dari sisi tanggung jawab sosial dalam bagaimana mengelola informasi yang dipertukarkan secara positif untuk mendukung kemajuan bangsa dan individu.

Adapun fungsi dan manfaat media *online* antara lain sebagai berikut:

a. Fungsi media *online*

- 1) Memberikan informasi atau pengetahuan pada pengguna tidak terbatas;
- 2) Memperdekat jarak jika berkomunikasi melalui media *online* dengan pengguna lainnya di belahan dunia;
- 3) Memudahkan pengguna dalam berbagai keperluan seperti mencari data karena media *online* tersambung dengan berbagai katalog perpustakaan pengguna dapat menggunakan informasi tersebut.

b. Manfaat media *online*

- 1) Media *online* sebagai sumber informasi tentang hal apapun tentu akan sangat membantu kehidupan masyarakat. Bagi mereka yang bekerja di bidang pendidikan, bidang literasi atau bidang kesenian bisa mencari berbagai informasi dari media *online*;

- 2) Keberadaan media *online* bisa mempermudah atau mempercepat suatu pekerjaan. Misalnya, ada suatu data dari satu kantor yang harus diserahkan pada kantor lain, penyerahan ini biasa memanfaatkan media surat elektronik (*email*) yang tentunya menggunakan internet;
- 3) Dalam hal pergaulan, media *online* juga mempunyai peranan yang sangat besar. Banyaknya forum dan jejaring sosial saat ini bisa membantu siapa saja untuk menambah pergaulan. Ini juga merupakan salah satu manfaat media *online* bagi masyarakat. Manfaat jejaring sosial juga tidak hanya menambah pergaulan, namun juga mempererat pertemanan dan membuat kita berlatih untuk bersosialisasi dengan lebih baik.

Menurut Budiarta (2019) beberapa manfaat *website* untuk desa adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Desa

Harus diakui, di Indonesia pembangunan daerah belum merata, tentunya hal ini menjadi masalah yang cukup bagi pemerintah. Masalah ini tidak hanya karena pembangunan yang kurang tepat sasaran, namun juga bisa dikarenakan kurangnya informasi mengenai situasi dan kondisi suatu desa. Dengan menggunakan media *website* maka akan membantu dalam promosi dan pengembangan desa. Karena desa dapat memberikan informasi terkait kondisi desa dari

kelebihan ataupun kekurangan kepada pemerintah dan juga kepada semua orang.

2. Publikasi Kegiatan Desa

Semua masyarakat desa berhak untuk mengetahui apa saja kemajuan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa, mereka juga ingin mengetahui apa saja kegiatan yang sudah dan akan diselenggarakan oleh desa. Dengan media *website*, pemerintah desa mempublikasi informasi pembangunan dan kegiatan desa tersebut sehingga dapat diakses oleh semua masyarakat.

3. Meningkatkan Pelayanan Pemerintah Desa

Dengan adanya *website* mampu meningkatkan pelayanan pemerintah desa, karena pemerintah bisa memberikan informasi terkait pelayanan melalui *website* desa. Selain itu pemerintah desa juga bisa membuka layanan berbasis *online* yang tentunya mempermudah para masyarakat.

4. Sarana Komunikasi Dua Arah

Meskipun berada di wilayah yang tidak begitu desa, namun masih saja ada kendala komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah desa. Hal ini karena sulitnya masyarakat dalam mengajukan keluhan dan aduan serta pemerintah desa yang belum menyediakan fasilitas khusus untuk menampung hal ini. Namun dengan adanya *website* desa dapat menjadi solusi terbaik masalah

komunikasi, karena bisa dijadikan sarana komunikasi dua arah dari pemerintah dan masyarakat.

5. Promosi Potensi Desa

Setiap desa tentunya memiliki potensi yang dapat menarik minat masyarakat luar. Misalnya kearifan lokal, kekayaan budaya, kuliner bahkan potensi wisata alam yang bisa dikembangkan. Dengan adanya *website* membantu pemerintah dalam melakukan promosi tersebut sehingga banyak orang yang mengetahui dan tertarik untuk berkunjung. Hal ini tentu mendatangkan keuntungan tersendiri bagi masyarakat desa itu.

6. Menjadi Portal Berita *Online*

Seperti portal berita pada umumnya yang memberikan berita terbaru dan paling aktual. Dengan adanya *website* desa dapat menjadi portal berita *online* terkait berita yang berada di sekitar desa sehingga informasi yang diberikan lebih dekat dengan pembacanya. Hal ini tentunya sangat membantu masyarakat karena cukup sulit mencari berita dari lingkup kecil

7. Sumber Data Yang Lengkap

Manfaat *website* untuk desa yang terakhir adalah menjadi sumber data yang lengkap. Setiap masyarakat tentunya membutuhkan informasi dan data desa untuk berbagai macam keperluan. Dengan adanya *website* desa akan membantu hal tersebut agar lebih praktis didapatkan.

6. Pengertian Desa

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki batas-batas wilayah yang diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya tanpa meninggalkan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Dalam Undang-Undang Desa telah memberikan kewenangan yang sangat besar kepada desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri dengan tujuan untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Desa adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota. Kedudukan desa sangat penting, baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun sebagai lembaga pemerintahan yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa memegang peran yang sangat penting demi terciptanya tata pemerintahan yang baik di desa. Pemerintah Desa merupakan bagian dari birokrasi negara dan sekaligus sebagai pemimpin

lokal yang memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola Pemerintahan Desa.

Advokasi tentang penyelenggaraan atau tata kelola Pemerintahan Desa yang baik sangatlah mendesak untuk dilakukan. Sungguhpun demikian, urgensinya sangat jarang dikomunikasikan di arena publik. Perhatian terhadap Pemerintahan Desa, walaupun ada, bersifat marginal. Padahal, justru pada level desa inilah interface atau sentuhan negara-rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan banyak terjadi. Ruang publik yang paling dekat untuk diakses masyarakat justru ada dan perlu diperluas pada level desa.

Desa Lapeo merupakan salah satu desa dari 17 desa dan satu kecamatan yang ada di kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, yang merupakan desa induk dari desa laliko dan desa kenje.

Wilayah desa Lapeo pada awal terbentuknya mempunyai wilayah yang cukup luas dengan jumlah Dusun sebanyak 8 (Delapan) dusun yaitu: Dusun Lapeo, Dusun Parabaya, Dusun Kapping Buttu, Dusun Gonda, Dusun Labuang, Dusun Galung dan Dusun Umapong.

Desa Cerdas (*smart village*) adalah konsep pendekatan pembangunan yang mendorong desa untuk melakukan transformasi pemanfaatan teknologi, dan ditujukan peningkatan kualitas layanan dasar serta pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya yang dilakukan ialah melalui peningkatan sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi secara

efektif untuk mendorong terciptanya solusi pembangunan lokal yang inovatif dan terbangunnya jejaring Desa Cerdas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara berkelanjutan untuk mendorong tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Pengembangan Desa Cerdas didasarkan pada berbagai bentuk inisiatif lokal atau kreasi lokal (*bottom up*) yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan desa. Kegiatan Desa Cerdas akan mendukung masyarakat dan desa di Indonesia untuk memanfaatkan teknologi digital secara efektif dalam pengembangan solusi prioritas pembangunan desa.

Desa Cerdas (*Smart Village*) sebagai sebuah diharapkan dapat mengarah pada terwujudnya transformasi pedesaan secara signifikan, yang berpusat pada warga, mendorong masyarakat dalam memanfaatkan infrastruktur digital, serta berkontribusi terhadap pengembangan berkelanjutan layanan secara inklusif dan merata.

Atas dasar tersebut, Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigras melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas. Skema peningkatan kapasitas dalam Desa Cerdas didukung oleh materi pembelajaran dan proses bimbingan teknis. Kegiatan peningkatan kapasitas merupakan dasar dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan Desa Cerdas.

Konsep Desa Cerdas bertujuan untuk mengembangkan kapasitas warga desa dalam memanfaatkan teknologi digital secara efisien dan

pendekatan *Human Centered Design* (HCD) adalah salah satu pendekatan yang banyak dipergunakan untuk memastikan pemanfaatan teknologi tetap memperhatikan dan mengedepankan kebutuhan pengguna teknologi tersebut dalam hal ini, warga desa.

Good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Ada pula yang mengartikannya sebagai tata pemerintahan yang baik dan ada pula yang mengartikannya sebagai sistem pemerintahan yang baik. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan publik *good and services* (Ari Dwipayana, 2003: 47).

Lembaga Administrasi Negara (2000: 6) memberikan pengertian *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Tujuan pokok *good governance* adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak atau stakeholder (negara, masyarakat madani dan sektor swasta) (Hardiyansyah, 2011: 105).

United Nations Development Program (UNDP) mengemukakan bahwa prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*),

meliputi: partisipasi (*participation*), 5 penegakan hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), orientasi konsensus (*consensus orientation*), keadilan (*equity*), efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), akuntabilitas (*accountability*), visi strategis (*strategic vision*) (Dede Rosyada dkk, 2003: 183). Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) tahun 2003, prinsip *good governance*, meliputi: akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, supremasi hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, profesionalitas, cepat tanggap, efektif dan efisien, dan berdaya saing (Idup Suhady, 2005: 50).

Desa, Kecamatan dan Kabupaten menjadi tumpuan pertama untuk membangun pemerintahan berbasis *smart village*. Jika sektor terkecil tidak berubah, maka akan sulit bagi pemerintah kota/kabupaten untuk mewujudkan *smart village*. Saat ini, kendala yang tersisa untuk penyebaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di semua desa adalah jaringan komunikasi yang belum merata di setiap wilayah.

C. KAJIAN TEORI

1. Teori Difusi Inovasi

Menurut Everett M. Rogers (1964) dalam bukunya yang berjudul "*Difussion of Innovations*" ia menjelaskan bahwa difusi merupakan proses ketika sebuah inovasi dikomunikasikan melalui beberapa saluran dengan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Disamping itu difusi juga dianggap sebagai suatu jenis perubahan sosial yaitu suatu proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Sedangkan inovasi adalah gagasan, praktik, atau benda yang dianggap/dirasa baru oleh individu atau kelompok masyarakat.

Titik awal munculnya teori difusi inovasi ditandai dengan terbitnya artikel berjudul *The People's Choice* yang ditulis oleh Paul Lazarfeld, Bernard Barelson, dan H. Gaudet pada tahun 1944. Di dalam teori difusi inovasi dikatakan bahwa komunikator yang mendapatkan pesan dari media massa sangat kuat untuk mempengaruhi orang-orang. Dengan demikian inovasi (penemuan) lalu disebar (difusi) melalui media massa akan kuat mempengaruhi massa untuk mengikutinya.

Awal perkembangan dari teori ini menududukkan peran pemimpin opini dalam mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Artinya, media massa mempunyai pengaruh yang kuat dalam menyebarkan penemuan baru. Tujuan utama dari difusi inovasi ini

adalah diadopsinya suatu inovasi (ilmu pengetahuan, teknologi, bidang pengembangan masyarakat) oleh anggota sistem sosial tertentu. Sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi, sampai kepada masyarakat.

Rogers (1983) mengatakan bahwa dalam proses difusi inovasi terdapat empat elemen pokok yaitu suatu inovasi yang dikomunikasikan melalui saluran komunikasi tertentu, dalam jangka waktu dan terjadi diantara anggota-anggota suatu sistem sosial.

- a. Inovasi (gagasan, tindakan atau barang) yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu penerimanya.
- b. Saluran komunikasi adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerimanya.
- c. Jangka waktu yakni proses keputusan inovasi mulai dari seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Penguatan terhadap keputusan tersebut sangat berkaitan dengan dimensi waktu.
- d. Diantara para anggota suatu sistem sosial.

Dalam beberapa perkembangan berikutnya, teori difusi inovasi senantiasa dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Inovasi merupakan awal untuk terjadinya perubahan sosial dan perubahan sosial pada dasarnya merupakan inti dari pembangunan masyarakat. Rogers dan Shoemaker (1971) menjelaskan bahwa

proses difusi merupakan bagian dari proses perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses dimana perubahan terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial.

Menurut Rogers dan Shoemaker (1971), perubahan sosial terjadi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. Penemuan (*invention*), adalah proses dimana ide/gagasan baru diciptakan atau dikembangkan.
- b. Difusi (*diffusion*), adalah proses dimana ide/gagasan baru dikomunikasikan kepada anggota sistem sosial.
- c. Konsekuensi (*consequences*), adalah suatu perubahan dalam sistem sosial sebagai hasil dari adopsi atau penolakan inovasi.

Menurut (Rogers, 1996: 336) menyatakan bahwa salah satu tujuan penelitian penyebaran adalah untuk menemukan solusi dalam mempersingkat kelambatan. Ketika ditetapkan, sebuah inovasi akan memiliki konsekuensi, dapat fungsional, atau disfungsional, langsung atau tidak langsung, nyata atau tersembunyi. Agen-agen perubahan biasanya mengharapkan agar pengaruh mereka langsung, fungsional, dan nyata walaupun hasil positif tersebut tidak selalu terjadi. Penggunaan media *online* mungkin merupakan inovasi yang paling cepat menyebar dalam sejarah teknologi.

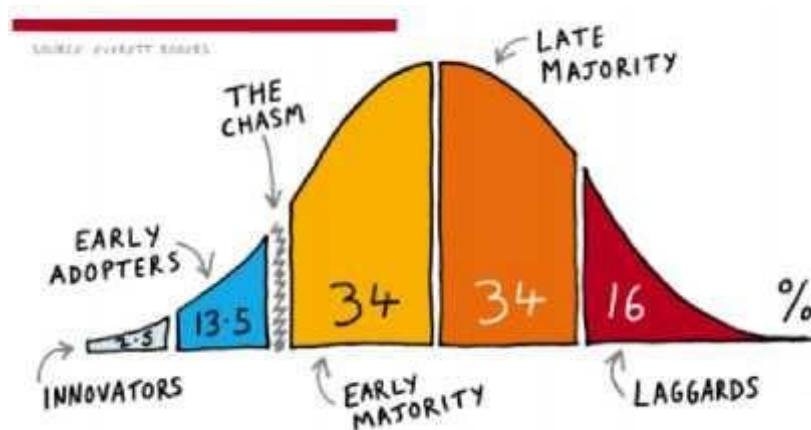
Teori difusi inovasi menyatakan bahwa suatu inovasi (misalnya gagasan, teknik atau teknologi baru) memancarkan atau menyebar dalam pola yang dapat diperkirakan. Beberapa orang akan menerima

atau mengadopsi suatu inovasi begitu mereka mengetahuinya, sementara orang lain memerlukan waktu yang sedikit lebih lama untuk menerima atau mengadopsi inovasi baru tersebut (Morissan, 2010: 141).

Berkaitan dengan proses difusi inovasi tersebut Menurut Elvinaro (2002: 65), Rogers dan Shoemaker mengemukakan bahwa teori difusi inovasi dalam prosesnya memiliki 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. Pengetahuan. Kesadaran individu akan adanya inovasi dan pemahaman tertentu tentang bagaimana inovasi tersebut berfungsi, tahap ini merupakan tahap penyebaran informasi tentang inovasi baru dan saluran yang paling efektif untuk digunakan adalah saluran media massa.
- b. Persuasi. Individu membentuk sikap setuju atau tidak setuju terhadap inovasi. Dalam tahap persuasi ini, individu akan mencari tahu lebih dalam informasi tentang inovasi baru tersebut dan keuntungan menggunakan informasi tersebut.
- c. Keputusan. Individu melibatkan diri pada aktivitas yang mengarah pada pilihan untuk menerima atau menolak inovasi tersebut.
- d. Konfirmasi. Tahap terakhir ini adalah tahapan dimana individu akan mengevaluasi dan memutuskan untuk terus menggunakan inovasi baru tersebut atau menyudahinya. Selain itu, individu akan mencari penguatan atas keputusan yang telah diambil sebelumnya.

Penerimaan atau penolakan terhadap sebuah inovasi adalah keputusan yang dibuat seseorang dalam menerima suatu inovasi. Menurut Rogers (1983) proses pengambilan keputusan inovasi adalah proses mental dimana seseorang berlalu dari pengetahuan pertama mengenai suatu inovasi, sampai memutuskan untuk menolak atau menerima, melaksanakan ide-ide baru dan mengukuhkan terhadap keputusan inovasi.



Gambar 2.2. Kategori Penerima Ide Baru

(Sumber: Internet)

Mengenai tingkat atau derajat penerimaan ide-ide baru (*innovation*) menurut Rogers dalam Cangara, 2020:366-368) terbagi atas lima tingkatan, yakni:

a. *Innovator* (Pembaharu)

Innovator (Pembaharu) adalah mereka yang pertamakali tersentuh inovasi (ide-ide baru). Kelompok ini tidak banyak jumlahnya, diperkirakan hanya 2,5% dari jumlah keseluruhan target sasaran.

Mereka umumnya adalah orang-orang yang gandrung untuk melakukan perubahan karena mobilitasnya yang tinggi keluar kota, dekat dengan para agen pembaharu (penyuluh), dan pada umumnya masih berusia muda sehingga tidak takut mengambil resiko.

b. *Early Adopter* (Penerima Awal)

Early Adopter (Penerima Awal) adalah mereka yang tersentuh inovasi setelah kelompok inovator memperkenalkannya. Mereka adalah kelompok yang terintegrasi dengan sistem sosial yang ada. Biasanya mereka menjadi tempat bertanya dan dimintai pertimbangan dari orang-orang yang ada disekitarnya. Jumlahnya relatif tinggi, yakni 13,5% dari jumlah target sasaran.

c. *Early Majority* (Penerima Mayoritas Awal)

Early Majority (Penerima Mayoritas Awal) adalah mereka yang tergolong sebagai penerima inovasi sebelum anggota kelompok lainnya menerima inovasi tersebut. Mereka tidak tergolong kelompok pimpinan, tetapi anggota biasa yang dekat dengan jaringan pimpinan yang menerima pembaruan. Mereka menjadi penghubung antara penerima dini (*early adopter*) dengan penerima lambat (*late adopter*). Jumlah kelompok ini berkisar 34% dari jumlah keseluruhan target adopter.

d. *Late Majority* (Penerima Mayoritas Lambat)

Late Majority (Penerima Mayoritas Lambat) adalah mereka yang menerima ide-ide baru (inovasi) setelah rata-rata anggota lainnya menerima lebih awal. Mereka menerima setelah melihat inovasi itu membawa keuntungan pada orang lain. Jumlah penerima mayoritas lambat kira-kira sama dengan jumlah penerima mayoritas awal, yakni 34%.

e. *Laggerd* (Pengikut)

Laggerd (Pengikut) adalah mereka yang tergolong penerima akhir dari sistem sosial yang ada. Mereka tidak memiliki pendapat dan berada diluar jaringan sosial, namun masih dekat pada kelompok mayoritas lambat. Mereka menerima inovasi setelah hampir semua orang disekelilingnya merasakan manfaatnya. Jumlahnya sekitar 16%, cenderung konservatif, lambat dan tradisional.

2. Teori *New Media*

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin pesat telah membuat dunia terasa makin luas dan ruang seolah menjadi tak berjarak lagi. Perubahan informasi kini tidak lagi dalam jangka minggu ataupun hari bahkan jam sudah mulai terkalahkan dengan waktu tiap detik.

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak (Cangara,

2016;137). Media memungkinkan kita dapat melihat lingkungan yang lebih jauh. Media komunikasi sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ruben dan Stewart (2013) media berfungsi untuk memperluas kemampuan kita memproduksi dan mendistribusi informasi dalam jarak yang sangat jauh dalam ruang dan waktu dari sumbernya.

Menurut Unde (2014) perubahan teknologi yang cepat dengan digitalisasi dan konvergensi telah menciptakan gelombang kedua media baru yang mungkin memiliki potensi untuk mengubah cukup radikal antara penonton dan media, senada dengan pendapat Green (2010) bahwa pendekatan media baru untuk mempelajari internet sebagai teknologi digital dan lingkungan yang konvergen. Hal ini menggambarkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi menggunakan internet yang kemudian dikenal dengan media baru.

Teori media baru merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh Pierre Levy, yang mengemukakan bahwa media baru merupakan teori yang membahas mengenai perkembangan media. Dalam teori media baru, terdapat dua pandangan, pertama yaitu pandangan interaksi sosial yang membedakan media menurut kedekatannya dengan interaksi tatap muka. Pierre Levy (dalam Littlejohn, 2012: 413) memandang *World Wide Web* (WWW) sebagai sebuah lingkungan informasi yang terbuka, fleksibel dan dinamis yang memungkinkan manusia mengembangkan orientasi pengetahuan yang baru dan juga

terlibat dalam dunia demokratis tentang pembagian mutual dan pemberian kuasa yang lebih interaktif dan berdasarkan pada masyarakat.

Istilah *new media* atau media baru merupakan media yang menggunakan internet, media *online* berbasis teknologi yang berkarakter fleksibel berpotensi interaktif dan dapat berfungsi secara privat maupun secara publik (Mcquails, 2011: 3).

Dalam bukunya Teori Komunikasi Massa, McQuail menjelaskan bahwa "Media Baru atau *New Media* adalah berbagai perangkat teknologi komunikasi yang berbagi ciri yang sama yang mana selain baru dimungkinkan dengan digitalisasi dan ketersediaannya yang luas untuk penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi". Menurut Denis McQuail ciri utama media baru adalah adanya saling keterhubungan, aksesnya terhadap khalayak individu sebagai penerima maupun pengirim pesan, interaktivitasnya, kegunaan yang beragam sebagai karakter yang terbuka, dan sifatnya yang ada di mana-mana.

Menurut Lister dkk (2009: 13-14) menyatakan bahwa media baru memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

a. Digital

Digital merupakan syarat wajib untuk dapat dikategorikan sebagai media baru, berbeda dengan media lama. Pada media baru semuanya tersimpan dalam bentuk digital. Media baru mengacu pada media yang bersifat digital dimana semua data

diproses dan disimpan dalam bentuk angka dan keluarannya disimpan dalam bentuk cakram digital. Terdapat beberapa implikasi dari digitalisasi media yaitu dematerialisasi atau teks terpisah dari bentuk fisik tidak memerlukan ruangan yang luas untuk menyimpan data karena data dikompres menjadi ukuran yang lebih kecil, data mudah diakses dengan kecepatan yang tinggi serta mudahnya data dimanipulasi.

b. Interaktif

Kebebasan dalam berinteraksi adalah syarat wajib juga untuk dikategorikan sebagai media baru, *user* pada media baru tidak hanya memberikan pesan namun juga dapat menerima pesan saat itu juga. Pengguna dapat berinteraksi satu sama lain dan memungkinkan pengguna dapat terlibat secara langsung dalam perubahan gambar ataupun teks yang mereka akses.

c. Hiperteks

Teks yang mampu menghubungkan dengan teks lain diluar teks yang ada. Hiperteks ini memungkinkan pengguna dapat membaca teks tidak secara berurutan seperti media lama melainkan dapat memulai dari manapun yang diinginkan dan merupakan potongan kata-kata yang akan masuk ke laman yang akan dituju saat kita klik. Contoh: pengguna *google* yang memudahkan orang untuk mencari informasi yang dibutuhkan.

d. Virtual

Karakteristik ini berkaitan dengan upaya mewujudkan sebuah dunia virtual yang diciptakan oleh keterlibatan dalam lingkungan yang dibangun dengan grafis komputer dan video digital. Sesuatu yang dapat diartikan “tidak nyata”. Tidak nyata yang dimaksud adalah tidak terdapat wujud fisiknya. Contoh: saat menggunakan foto profil pada sebuah akun aplikasi sosial media, foto yang terpasang adalah wajah kita saja melainkan bukan wujud kita yang sebenarnya.

e. Jaringan

Sebuah internet tidak dapat berguna jika tidak terdapat *user/penggunanya*. Dalam hal ini internet dapat menyebabkan sebuah hubungan antar satu pengguna dengan pengguna lainnya. Karakteristik ini berkaitan dengan ketersediaan konten berbagi melalui internet.

f. Simulasi

Simulasi tidak berbeda jauh dengan virtual. Karakter ini terkait dengan penciptaan dunia buatan yang dilakukan melalui model tertentu. Penyajian kembali peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, tetapi dalam penyajian barunya diperlukan penambahan efek tertentu.

Internet merupakan suatu teknologi yang menggambarkan secara jelas properti-properti seperti konvergen, *digital networking*,

global reach, interaktivitas dan *many-to-many communication*, serta suatu bentuk media yang mengizinkan penggunanya menjadi pencipta maupun pengguna isi atau pesan (Flew, 2014).

Selama tahun 2000 internet telah memasuki fase yang disebut *web 2.0 (web two point zero)*. Pentingnya *web 2.0* adalah media siar menghasilkan sebuah konteks hubungan sosial interaksi nasional atau internasional, ada beberapa cara dimana individu mendapatkan interaksi berharga untuk membuat koneksi global secara nyata.

Internet adalah salah satu bentuk media baru (*new media*). Internet dinilai sebagai alat informasi paling penting untuk dikembangkan kedepannya. Internet memiliki kemampuan untuk mengkode, menyimpan, memanipulasi dan menerima pesan (Ruben, 1998: 110). Kelebihan internet sebagai media komunikasi adalah jangkauannya yang global, kecepatannya dalam mengirim pesan, dan tingkat interaktivitasnya yang tinggi. *Trend* yang terjadi saat ini adalah pengguna internet untuk kebutuhan hiburan. Melalui internet orang dapat menggunakan mesin pencarian untuk mencari informasi yang mereka butuhkan, menjelajah situs-situs dan menjalin interaksi sosial.

Salah satu kemampuan internet saat ini adalah bisa mengunduh materi-materi dari dunia maya kemudian disimpan dalam komputer pribadi dan data itu bisa diduplikasi atau di transfer

ke alat lain yang terpisah dengan komputer, misalnya CD. Menurut Bagdikian (2004), duplikasi dan penyebaran materi dari internet ini bisa mencapai jangkauan yang sangat luas. Satu orang khalayak bisa mengunduh kemudian menyebarkannya pada orang-orang dalam jaringannya dan seterusnya. Makin lama, penyebaran makin luas informasi dalam bentuk digital memang bisa diproduksi secara sempurna, gratis, dan tak terbatas.

Situs *web* membuat informasi, komunikasi dan transaksi antara masyarakat dan pemerintah dapat dilakukan via internet sehingga ada beberapa manfaat yang dihasilkan seperti misalnya komunikasi dalam sistem administrasi berlangsung dalam hitungan jam bukan hari atau minggu. Artinya pelayanan pemerintah pada masyarakat menjadi sangat cepat, *service*, dan informasi dapat dicari di kantor, rumah bahkan *mobile* dimanapun tanpa harus hadir secara langsung.

Situs atau *website* adalah kumpulan halaman *web* (*web page*) yang disimpan dalam *server* dan dapat diakses menggunakan internet atau hubungan area lokal. Situs sendiri terdiri dari beberapa unsur yaitu *web content* (isi), *web appearance* (tampilan), dan *web usability* (kemudahan penggunaan).

Berikut adalah paparan mengenai elemen-elemen situs menurut Zimmerman (2001), yaitu:

a. Konten

Menurut Rosenfield dan Morville (2006), konten adalah semua hal yang ada di dalam sebuah situs termasuk teks, data, dokumen, aplikasi, pelayanan, gambar, audio, video, dan sebagainya. Konten akan memainkan peran penting yang membuat orang mengatakan sebuah situs menarik dan bermanfaat atau tidak. Namun konten paling sering dikaitkan dengan *copy text*. Menurut Zimmerman (2001), orang juga akan membaca ketika mengakses media *online*, mereka hanya melihat sekilas untuk menghemat waktu. Orang cenderung lebih lambat membaca ketika membaca tulisan di kertas karena keterbatasan tempat dan waktu, tulisan harus diadaptasikan dengan keadaan di dunia maya.

b. Tampilan

Web appearance adalah bagaimana *website* ditampilkan. Mulai dari pemilihan dan pembuatan gambar serta penyusunan seluruh konten (*layout*). Tampilan adalah hal pertama yang diperhatikan oleh pengunjung dan mempengaruhi keputusan pengunjung apakah mereka akan terus menjelajahi situs itu lebih dalam atau malah keluar dari situs tersebut.

Selain itu kebetahan pengunjung situs juga sedikit banyak adalah tanggung jawab dari tampilan situs, isi yang bagus tanpa

didukung oleh tampilan yang nyaman dilihat akan membuat pengunjung tidak nyaman juga. Tampilan tidak hanya harus cantik namun juga memiliki *user interface* yang bersahabat dan mudah dimengerti oleh pengunjung situs baik yang awam sekalipun.

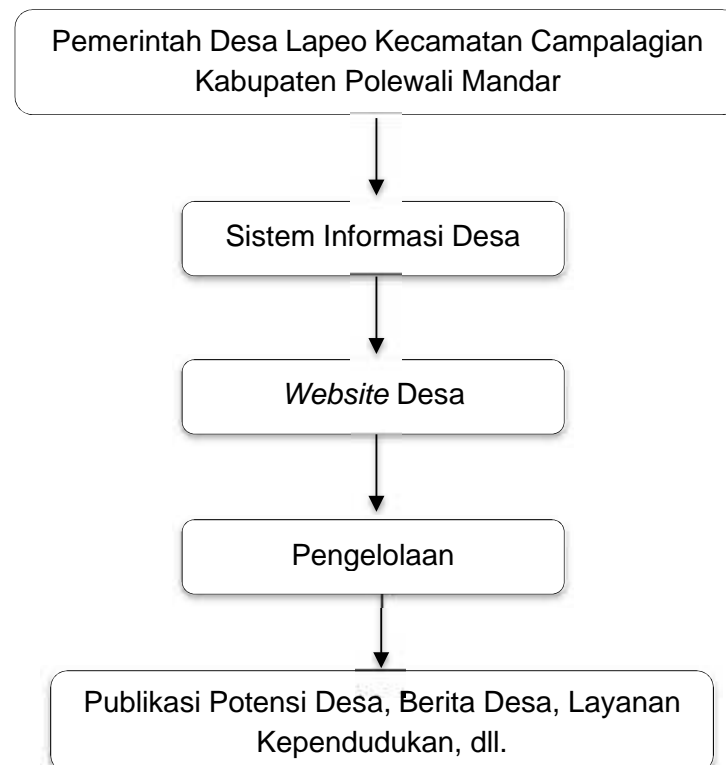
c. Kemudahan Akses

Kemudahan situs adalah tingkat kemudahan yang dihadapi seseorang dalam menghadapi sebuah situs. Menurut pakar *usability* Jakob Nielsen dan professor ilmu komputer Ben Shneiderman dari Buku *Communication and Human Behaviour* karangan Ruben, kemudian situs dipengaruhi oleh kemudahan dalam mempelajari cara penggunaannya, efisiensi dalam menggunakannya, kemudahan untuk mengingat, kemungkinan untuk berbuat kesalahannya kecil, kepuasan subjektif dari sisi pengguna.

Dari kedua teori tersebut, yang digunakan dalam membahas rumusan masalah adalah teori Difusi Inovasi dari Everett M. Roger. Teori difusi inovasi ini dianggap paling sesuai untuk membahas masalah yang diteliti karena teori ini memiliki karakteristik yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa berbicara tentang pemerintah desa, dulunya profil tentang pemerintah desa masih menggunakan sistem manual secara tertulis tertuang didalam laporan-laporan yang tercetak. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi

manusia akan berinovasi saat ini profil desa tersebut telah dikembangkan menggunakan sistem berbasis data seperti *website*.

D. KERANGKA PIKIR PENELITIAN



Gambar 2.3. Kerangka Pikir Penelitian
(Sumber: Peneliti, 2022)